

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI  
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19  
DI KABUPATEN KARIMUN**

Defikasyafna Pratiwi  
NPP. 30.0270

*Asdaf Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau  
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: defikasyafnapratiwi@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Jose Rizal, S.STP,M.Si

***ABSTRACT***

**Problem/Background (GAP):** Poverty is a social problem that continues to develop in human life so that it affects the welfare of society. there are various policies issued by the government as an effective step in handling poverty, one of which is the Cash Social Assistance program. With the Cash Social Assistance program, the central government collaborates with local governments to eradicate poverty. Effective program implementation can affect the poverty rate so that this social assistance is expected to be able to improve the quality of community welfare. **Purpose:** This study aims to determine and analyze how the implementation of the Cash Social Assistance program and to find out whether there are obstacles in the implementation of the program and to analyze the benefits of Cash Social Assistance for the community in Karimun Regency. **Methods:** The research method used is qualitative method. **Results/Findings:** The results of this study indicate that based on the results of interviews and observations of researchers, the implementation of the cash social assistance program has not been able to reduce the poverty rate so that there is still a need for a program that has a wider reach and is significant in handling poverty. The obstacles in the implementation of Cash Social Assistance are the delay in updating the DTKS and the lack of socialization to the community so that many people do not understand in detail the criteria and conditions for receiving each social assistance, and the utilization of Cash Social Assistance can only be used to meet daily needs due to the limited amount of funds so that it cannot be used by the community to open a business. **Conclusion:** The implementation of the Cash Social Assistance program in Karimun Regency has gone well, it's just that some improvements are still needed in terms of data collection so that the social assistance program can run effectively and efficiently in helping to improve community welfare.

**Keywords:** Program Implementation; Poverty; Cash Social Assistance

## ABSTRAK

**Permasalahan/ Latar Belakang (GAP):** Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang terus berkembang di kehidupan manusia sehingga hal tersebut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Adanya berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai langkah efektif dalam penanganan kemiskinan salah satunya yaitu program Bantuan Sosial Tunai. Dengan adanya program Bantuan Sosial Tunai pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menumpas kemiskinan. Implementasi program yang efektif dapat mempengaruhi angka kemiskinan sehingga dengan adanya bantuan sosial ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi program Bantuan Sosial Tunai dan untuk mengetahui apakah hambatan dalam implementasi program serta menganalisis manfaat Bantuan Sosial Tunai bagi masyarakat di Kabupaten Karimun.

**Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.

**Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti implementasi program bantuan sosial tunai belum mampu untuk menekan angka kemiskinan sehingga masih diperlukannya program yang jangkauannya lebih luas dan signifikan dalam penanganan kemiskinan. Hambatan dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai adalah masih adanya keterlambatan dalam memperbarui DTKS dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang belum memahami secara detail mengenai kriteria dan ketentuan penerima setiap bantuan sosial, dan pemanfaatan Bantuan Sosial Tunai hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan jumlah dana yang terbatas sehingga tidak dapat dipergunakan masyarakat untuk membuka usaha.

**Kesimpulan:** Implementasi program Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Karimun sudah berjalan dengan baik hanya saja masih diperlukan beberapa peningkatan dalam hal pendataan sehingga program bantuan sosial dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Implementasi Program; Kemiskinan; Bantuan Sosial Tunai

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintahan di Indonesia menggunakan asas sentralisasi dan desentralisasi dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahannya. Adanya asas sentralisasi diartikan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat pada suatu manajemen atau organisasi. Sedangkan desentralisasi merupakan keseimbangan yang berkaitan dengan kewenangan antara pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah. Hambatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah Kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang terus berkembang

di kehidupan manusia.(Kadji, 2004) Kemiskinan mengalami proses yang panjang dan sangat lama, dapat diartikan bahwa kemiskinan adalah bentuk dari ketidakmampuan seseorang dalam menyesuaikan jumlah pendapatannya dengan kebutuhan kehidupannya sehingga mengalami kesulitan untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan terkait perekonomian yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan melakukan serangkaian penerapan suatu kebijakan dan program pemerintah. Penanggulangan kemiskinan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar makanan yang dapat diperhatikan melalui sisi konseptualis garis kemiskinan yang didasarkan pada representasi dari jumlah rupiah minimum untuk memenuhi suatu kebutuhan pokok minimum. (Sajian, 2021) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2020 dan Nomor 54/HUK/2020 melaksanakan jaringan pengamanan sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan untuk menjaga daya beli masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19 adalah dengan mengeluarkan suatu program Bantuan Sosial Tunai (BST) program ini dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bagi masyarakat miskin dan rentan miskin akibat dari ketidakstabilan ekonomi masa Pandemi Covid-19 (Gemiharto & Juningsih, 2021). Kriteria Penerima BST adalah KK yang telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI dan usulan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam penyaluran BST dilakukan melalui dua tahapan yaitu; pertama; penyaluran dilakukan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), melalui rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kedua; penyaluran BST dapat dilakukan melalui kantor pos atau penyaluran BST langsung ke tempat tinggal. Pemerintah Kabupaten Karimun melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan dengan pelaksanaan salah satu program Kementerian Sosial RI yaitu program BST

pada bulan Maret 2021 dan dilaksanakan kembali pada bulan Juni 2021. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 161/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona* BST di Kabupaten Karimun dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan dengan indeks bantuan sebesar Rp.300.000. per bulan atau disesuaikan dengan keuangan Negara. Pemerintah memiliki ketentuan dalam menentukan penerima BST yang layak yaitu masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan program PKH, BPNT, maupun kartu pra kerja. Data penerima bantuan sosial ini terdaftar dalam DTKS dan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat yang belum pernah menerima bantuan sosial. Penyaluran BST di Kabupaten Karimun diberikan kepada 7.910 KK. Dalam hal ini pemerintah di Kabupaten Karimun memberikan BST kepada masyarakat yang terkena dampak dari pandemi penyebaran virus Covid-19. Dengan menentukan sasaran penerima bantuan yaitu; Kepala Keluarga yang berpenghasilan kurang dari RP. 600.000 per bulan, seperti buruh dan kuli potong selanjutnya BST juga diberikan kepada Kepala Keluarga yang berusia lanjut dan memiliki penyakit menahun serta masyarakat yang terputus mata pencahariannya pada masa pandemi Covid-19. (Aisyah et al., 2021) Pada penyaluran BST seharusnya disesuaikan dengan kategori KPM dan sesuai dengan kriteria penerima BST sehingga mampu menjadi program yang mampu menanggulangi kemiskinan masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Hal tersebut menjadikan alasan bagi peneliti untuk melakukan riset di Kabupaten Karimun untuk melakukan penelitian secara mendalam untuk menganalisis mengenai penanganan kemiskinan melalui program Bantuan Sosial Tunai. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul “Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai dalam penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Kabupaten Karimun”.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi salah satu hambatan dalam penanganan kemiskinan melalui program Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Karimun yakni masih adanya keterlambatan dalam memperbarui data dan

kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Bantuan Sosial yang diberikan oleh pemerintah.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian Karen Kambey (2019) berjudul “Implementasi kebijakan bantuan sosial tunai kepada masyarakat terdampak Covid -19 di Kelurahan Sumalangka Kecamatan Tondano Utara”. Menemukan bahwa dalam pendataan calon penerima manfaat bantuan sosial harus didata berdasarkan standar operasional yang telah ditetapkan, pada pelaksanaan bantuan sosial diudasarkan pada DTKS sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi implementasi program. ((Kambey, 2019)

Penelitian Ardian Purba yang berjudul Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan Kota Medan dalam perspektif ekonomi. Dalam penelitian ini temuan penelitian adalah Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Medan Belawan dianggap sudah tepat sasaran tetapi masih diperlukannya optimalisasi dalam penyaluran bantuan. Hal tersebut dikarenakan adanya mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan jumlah bantuan yang diberikan dengan jumlah bantuan yang diterima oleh masyarakat. Tetapi masih diperlukannya perbaikan data dalam penerimaan bantuan.(Ardian & Purba, 2021)

Penelitian Nasution yang berjudul Implementasi kebijakan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran di masa pandemi. (Nasution, 2022) Dengan hasil temuan penelitian yaitu Pandemi Covid-19 merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan hal tersebut dapat dilihat bahwasanya banyak program pemerintah yang dilakukan bertujuan untuk menekan angka kemiskinan yaitu dengan menerapkan beberapa program diantaranya ;Bantuan social tunai;Bantuan langsung tunai;Kartu Pra kerja dan Program Keluarga Harapan Kebijakan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dengan melaksanakan program pemerintah yang tepat sasaran sehingga mampu mencapai tujuan dari pengadaan program tersebut.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana konteks penelitian ini adalah terfokus pada penanganan angka kemiskinan masyarakat dengan melakukan program efektif pemerintah yaitu Bantuan Sosial Tunai sehingga dapat menekan angka kemiskinan pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Karimun.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Program Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Karimun, Faktor penghambat apakah yang terjadi pada penanganan kemiskinan melalui program Bantuan Sosial Tunai dan Bagaimana masyarakat di Kabupaten Karimun memanfaatkan Bantuan Sosial Tunai untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.

## **II METODE**

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam riset ini bertujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai implementasi program Bantuan Sosial Tunai dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karimun. Instrumen yang dipergunakan oleh penulis adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah peneliti sementara instrumen penunjang berdasarkan interview dan pengamatan penelitian. (Sugiyono, 2019) Pada penelitian ini digunakan metode pengumpulan data melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

Teknik wawancara yang dilakukan pada riset ini adalah memakai teknik semi terstruktur. Observasi pada penelitian ini dengan melakukan pengamatan langsung dengan ikut serta secara langsung di masyarakat. penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 bulan, dimulai sejak bulan Januari hingga bulan Februari tahun 2023, Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Sosial dan Pemerintahan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

### III HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis implementasi program Bantuan Sosial Tunai dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karimun dengan menggunakan teori Implementasi Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa implementasi program dapat diukur berdasarkan 6 (enam) dimensi yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap kecenderungan pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. (Anggara, 2014) Adapun pembahasan dapat dilihat berdasarkan subbab berikut.

#### 3.1 Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai dalam penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat di Kabupaten Karimun

Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karimun telah berjalan dengan cukup baik, hal tersebut diukur berdasarkan 6 (enam) dimensi yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap kecenderungan pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Implementasi Program BST sebagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dijalankan sesuai dengan tahapan yang telah peneliti jelaskan pada dimensi Implementasi yang telah dijabarkan berdasarkan tabel *milestone* implementasi program yang menggambarkan tahapan-tahapan dalam implementasi program Bantuan Sosial Tunai dalam penanggulangan kemiskinan. Implementasi program sudah berjalan dengan sistematis akan tetapi belum mampu memberikan *output* atau hasil yang maksimal dikarenakan dalam pelaksanaan program masih ditemukan beberapa hambatan eksternal maupun internal sehingga masih diperlukan peningkatan dan upaya langsung dari pemerintah dalam mengatasi hambatan dan kendala pada implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karimun. Dalam penelitian ini peneliti berdasarkan 6 (enam) dimensi yang digunakan dalam menganalisis Implementasi Program BST di Kabupaten Karimun.

**Tabel 1 Implementasi Program**

No	Dimensi	Hasil
1.	<b>Ukuran dan Tujuan Kebijakan</b>	<p>Kinerja program pada pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai merupakan upaya pemerintah untuk penanganan kemiskinan tetapi belum berjalan secara efektif karena masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengetahui jenis-jenis bantuan sosial dari pemerintah sehingga masih diperlukannya pelaksanaan sosialisasi yang dapat membantu masyarakat untuk memahami dan mendapatkan informasi dengan optimal.</p> <p>Adanya keinginan masyarakat yang tinggi untuk mendapatkan bantuan sosial menjadi perhatian utama pemerintah, hal tersebut dikarenakan mekanisme penerima bantuan sosial dalam satu masyarakat tidak boleh mendapatkan bantuan double yang dapat menghambat efektivitas program bantuan sosial.</p> <p>Tujuan kebijakan Bantuan Sosial Tunai ini adalah sebagai penanggulangan kemiskinan masyarakat akan tetapi dengan jumlah kuota bantuan yang terbatas menyebabkan penerima bantuan sosial tunai hanya sedikit dan tidak mampu mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara optimal.</p>
2.	<b>Sumber Daya</b>	<p>Sumber Daya merupakan hal yang tidak terlepas dari Manusia, hal tersebut dikarenakan manusia memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan program bantuan sosial tunai, pada implementasi program bantuan sosial tunai di Kabupaten Karimun dari dimensi sumber daya manusia sudah cukup optimal akan tetapi hal tersebut harus terus mengalami peningkatan karena kualitas sumber daya yang baik mempengaruhi ketepatan pencapaian tujuan program. Sumber daya yang bermutu dan professional sangat</p>



		<p>dibutuhkan dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta diperlukannya pelatihan serta tingkat pendidikan yang memadai sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga hal ini mempengaruhi tingkat wawasan dan kecakapan dalam melaksanakan tugas Dinas. Dengan kondisi geografis dari Kabupaten Karimun yang terpisahkan oleh lautan antar kecamatannya sehingga membutuhkan koordinasi dan sumber daya manusia yang optimal dan efektif.</p>
<p><b>3.</b></p>	<p><b>Karakteristik Agen Pelaksana</b></p>	<p>pengelolaan program ini dibentuk dalam satu tim pelaksana dengan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial melakukan pengawasan terhadap anggota-anggota dalam menjalankan program Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Karimun. Untuk melakukan peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegawai kepada masyarakat sebaiknya dilakukan pelatihan bagi pegawai sehingga pelatihan tersebut dapat bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan dan pengabdian pegawai kepada masyarakat sehingga dapat melaksanakan tugas dengan wawasan dan kecakapan yang memadai. dalam hal penyaluran Bantuan Sosial Tunai ini diperlukan penanganan yang optimal sehingga bantuan dapat tepat sasaran dan tepat manfaat sehingga diperlukannya kompetensi staf pelaksana untuk mencapai tujuan dari program tersebut.</p>
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Tingkat Komunikasi</b></p>	<p>Untuk menciptakan komunikasi yang baik diperlukannya kerjasama antar elemen pemerintahan yang terkait. Dinas Sosial Kabupaten Karimun dalam melakukan</p>

		<p>komunikasi mengenai penyaluran BST sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Dinas sosial melakukan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Karimun. Pada implementasi program BST di Kabupaten Karimun, komunikasi sekaligus koordinasi antara Dinas Sosial di Kabupaten Karimun kepada Kecamatan dan Kelurahan yang membantu Dinas Sosial dalam mengurus Keluarga Penerima Manfaat BST di Kabupaten Karimun dan sudah dilaksanakan dengan baik tetapi diperlukannya peningkatan dan pengembangan sehingga pendataan DTKS dapat berjalan dengan efektif. Dengan adanya DTKS yang kurat dapat membantu penyaluran BST yang tepat sasaran.</p>
<p>5.</p>	<p><b>Koordinasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana</b></p>	<p>Pada Implementasi program BST ditemukan bahwa sudah adanya koordinasi dari pemerintah terkait BST akan tetapi belum berjalan dengan maksimal hal tersebut dikarenakan keterbatasan ruang gerak pemerintah pada saat pandemi, tetapi pemerintah sudah melakukan langkah alternatif yaitu sosialisasi melalui <i>zoom meeting</i> tetapi hal tersebut tidak mampu berjalan dengan baik karena keterbatasan pemahaman masyarakat.dan masih tingginya tingkat kemalasan masyarakat sehingga menghambat pemberian informasi yang prima dan efektif kepada masyarakat.</p>

6.	<b>Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik</b>	Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat merasa terbantu dengan adanya BST tetapi di sisi lain masih banyak masyarakat yang belum terjangkau dalam hal bantuan sosial tunai. Dilingkungan sosial peneliti menganggap masih diperlukannya peningkatan dalam hal memberikan pemahaman kepada masyarakat, pada lingkungan ekonomi tentu belum berjalan dengan optimal karena dana yang didapatkan pada bantuan sosial tunai belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pada lingkungan politik diperlukannya sudah mendapatkan dukungan penuh dari elemen pemerintahan sehingga mempermudah koordinasi dan komunikasi pelaksanaan bantuan sosial tunai di Kabupaten Karimun.
----	---	---

Sumber : Diolah oleh peneliti 2023

Pada **Tabel 1** dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan peneliti dapat menganalisis dan menggemaburkan secara umum implementasi program Bantuan Sosial Tunai sebagai upaya penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat di Kabupaten Karimun sudah berjalan dengan baik tetapi hal tersebut masih memerlukan beberapa peningkatan dan perbaikan sehingga program pemerintah dapat berjalan dengan optimal dan efektif serta bantuan dapat tepat sasaran dan manfaat.

### **3.2 Faktor Penghambat Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Karimun**

Implementasi program tidak terlepas dari adanya hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan suatu program pemerintah, setiap program pemerintah memiliki hambatan dan kesulitan tersendiri dalam mencapai tujuan dari program tersebut.

Hal yang mempengaruhi terhadap suatu program adalah adanya komunikasi dan koordinasi yang terjalin dengan baik sehingga dapat memberikan keluaran kebijakan yang baik pula bagi masyarakat. Apabila keadaan agen pelaksana kebijakan dapat berjalan dengan baik maka keberhasilan implementasi program memiliki harapan tinggi untuk mampu berjalan dengan optimal dan tepat sasaran. Pada penelitian yang telah dilakukan peneliti menganalisis terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan BST di Kabupaten Karimun

No	Hambatan	Upaya Penanganan
1.	Ketidaksinkronan data yang diterima oleh dinas sosial dan Dinas kependudukan pencatatatan sipil di Kabupaten Karimun.	Melakukan perbaikan data penerima BST sehingga dapat tepat sasaran dan data yang terbaru sesuai dengan kondisi masyarakat.
2.	Keterlambatan dalam memperbarui data terpadu kesejahteraan masyarakat	Memanfaatkan kecerdasan yang dimiliki oleh pegawai pemerintah untuk melakukan interaksi kepada masyarakat dan melakukan inovasi sehingga program dapat diterima baik oleh masyarakat dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Serta melakukan koordinasi yang efisien sehingga membantu dalam hal pendataan DTKS yang optimal dan terbaru sesuai dengan kondisi masyarakat.
3.	Kurangny Pemahaman masyarakat mengenai kriteri penerima bantuan sosial tunai	Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Karimun, agar tidak melakukan pendaftaran di dua kelurahan yang berbeda sehingga tidak ditemukan data <i>double</i> . <i>Dan melaksanakan sosialisasi secara rutin baik mengenai mekanisme bantuan sosial maupun SOP yang berlaku.</i>

Dapat dilihat berdasarkan **Tabel 2** di atas terkait dengan kendala dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Karimun dalam upaya penyaluran bantuan sosial tunai yang tepat sasaran dan tepat manfaat serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat meminimalisir angka kemiskinan di Kabupaten Karimun secara efektif.

### **3.3 Pemanfaatan Bantuan Sosial Tunai Bagi Keluarga Penerima Manfaat**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Karimun sangat membantu masyarakat dan mengurangi beban yang terdampak pandemi Covid-19. Adanya program BST telah membantu masyarakat Karimun dalam pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan. Program ini banyak membantu masyarakat miskin sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup serta mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Karimun sehingga tidak meningkatkan lebih jauh pada masa pandemi Covid-19.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dengan adanya Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karimun dapat ditemukan bahwa implementasi program tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dapat mengganggu optimalisasi program seperti masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga mempengaruhi pemahaman masyarakat yang masih terbatas mengenai bantuan sosial tunai, masih ditemukannya data double yang dapat merugikan masyarakat karena adanya penerima bantuan yang menerima bantuan sosial pemerintah secara double sehingga diperlukannya koordinasi dan komunikasi yang efektif disetiap elemen pemerintahan di Kabupaten Karimun. Dengan adanya pemanfaatan Bantuan Sosial Tunai yang optimal dari masyarakat diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun jumlah dana yang terbatas paling tidak mampu untuk membantu meringankan beban masyarakat. Kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat mempengaruhi kepuasan masyarakat sehingga diperlukannya pelatihan sehingga terbentuknya profesionalitas kerja serta tingkat pendidikan yang memadai sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien.

#### IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa Dalam Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai sebagai upaya penanganan kemiskinan akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Karimun sudah diupayakan berjalan dengan optimal tetapi semua itu tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan yang muncul dalam pelaksanaan implementasi program. Sehingga belum berjalan dengan efektif hal tersebut dikarenakan masih terdapat kekeliruan dalam pendataan sehingga data penerima tidak mengalami pembaharuan yang menyebabkan bantuan belum tepat sasaran dan penerima bantuan yang belum merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Kinerja program BST belum berjalan dengan efektif hal tersebut dikarenakan masih banyak ditemukan masyarakat yang belum memahami kriteria penerima BST sehingga menganggap bahwa seluruh bantuan memiliki kriteria penerima tertentu. Untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial di anggap masih kurang dari segi jumlah. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah pegawai yang berada di dinas sosial Kabupaten Karimun, dengan kuantitas pegawai yang dimiliki tentu belum bisa menjangkau daerah yang berada di Karimun secara keseluruhan dikarenakan Karimun yang kecamatannya banyak yang terpisah oleh lautan, masih terdapat kekurangan seperti ditemukannya data double yang disebabkan oleh kekeliruan dari kelurahan yang dapat merugikan masyarakat oleh karena itu diharapkan pegawai lebih optimal lagi dalam melaksanakan tugasnya guna kelancaran program pemerintah. Serta pelaksana tugas Bantuan Sosial Tunai sudah bekerja dengan optimal dalam menajalakan kebijakan sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga dengan adanya respon pemahaman dari implementor menjadi faktor penunjang dalam kesuksesan suatu program pemerintah. Koordinasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat beserta instansi lainnya yang ikut membantu mensukseskan program ini yaitu, Himbara dan Kantor pos. dilakukannya koordinasi secara berkelanjutan sehingga dapat berjalan dengan optimal.

**Keterbatasan Penelitian** . Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu penelitian dan kondisi lingkungan yang terjadi pada saat penelitian ini dilaksanakan. Penelitian ini masih membutuhkan banyak referensi yang lebih optimal untuk menunjang kualitas.

**Arah Masa Depan Penelitian (*Future work*)** Peneliti menyadari bahwa masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu meneliti mengharapkan diadakannya penelitian lanjutan yang lebih detail dan mendalam sehingga mampu memberikan solusi yang lebih efektif dalam hal penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga terdapat penelitian yang bisa memperluas pemahaman mengenai pentingnya upaya penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat sehingga dengan adanya program bantuan sosial dari pemerintah dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan manfaat dan tujuan program.

## **V. UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih terutama diucapkan kepada pemerintah Kabupaten Karimun terkhususnya Dinas Sosial Kabupaten Karimun beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu peneliti untuk mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Anggara, Sahya. 2014 *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Aisyah, T., Sukmawati, C., & Hasyim, M. (2021). *Efektivitas bantuan pangan non tunai (bpnt) program saat covid-19 di Kabupaten Bireuen*.
- Ardian, M., & Purba, A. M. (2021). *Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di kota Medan dalam perspektif ekonomi politik*.
- Gemiharto, I., & Juningsih, E. R. (2021). *Komunikasi pemerintahan dalam implementasi kebijakan bantuan sosial tunai di kabupaten Bandung*.
- Kadji, Y. (2004). *Kemiskinan dan konsepnya. Ekonomi Dan Bisnis*,
- Kambey, K. (2019). *Implementasi kebijakan bantuan sosial tunai kepada masyarakat terdampak covid 19 di kelurahan Sumalangka kecamatan Tondano utara*.
- Nasution, R. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menekan Angka Kemiskinan Dan Penagguran Di Masa Pandemi. Jurnal Keadilan*, 13.
- Sajian, A. (2021). *Implemetasi program bantuan sosial tunai dalam upaya penanggulan masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19*.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

